

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
MALUKU TAHUN 2025**

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit Provinsi Maluku	Capaian Nilai 8 (delapan) Aspek Sistem Merit Hasil Penilaian KASN	280	BKD Prov. Maluku	RENSTRA BKD
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien, dan Memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Nilai SAKIP BKD	Hasil Evaluasi AKIP berdasarkan empat Komponen yang dinilai (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	BB	BKD Prov. Maluku	RENSTRA BKD

Definisi operasional **Indikator Kinerja Utama** sebagai berikut :

1. Indikator Nilai Sistem Merit Definisi Indikator Pengukuran dilakukan melalui kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara
2. Indikator Nilai SAKIP Definisi Indikator rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dasar Hukum :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Cara Perhitungan :

1. Jumlah skor penilaian atas aspek indikator sistem merit.
2. Jumlah nilai komponen penilaian

Ambon, 8 Januari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI MALUKU,**



Drs. H. T. SOAMOLE, M.Si
NIP. 196508131992092001